



SALINAN

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa sesuai hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2008 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN
Dan
WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dokumen Perubahan RPJMD Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijaksanaan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX : Penutup

- (2) Dokumen Perubahan RPJMD Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 76,80;
 - b. Indeks Pendidikan pada tingkat 78,04;
 - c. Indeks Kesehatan pada tingkat 77,27;
 - d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tingkat 98,38;
 - e. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tingkat 42 persen;
 - f. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 persen;

- g. PDRB per kapita sebesar 30,00 juta Rupiah;
 - h. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,00 persen;
 - i. Indeks Gini pada skala 0,300;
 - j. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 5,00 persen;
 - k. Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,00 persen;
 - l. LPE sektor industri pengelolaan sebesar 3,00 persen;
 - m. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian sebesar 2,50 persen;
 - n. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 12,50 persen;
 - o. Tingkat pertumbuhan nilai investasi sebesar 40 persen;
 - p. Indeks Layanan Kualitas Infrastruktur pada tingkat 88,68;
 - q. Indeks Konektivitas Wilayah pada skala 80,00;
 - r. Persentase Luas Kawasan Kumuh sebesar 97,36 persen;
 - s. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tingkat 60,68;
 - t. Indeks Reformasi Birokrasi pada skala B;
 - u. Nilai Sakip pada tingkat BB;
 - v. Opini BPK pada predikat WTP (Wajar Tanpa Perkecualian); dan
 - w. Indeks Kepuasan Masyarakat pada skala Baik.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2019-2023.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 01 September 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 01 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (5-103/2021)

BAB IX PENUTUP

Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019-2023. Pada saat ini RPJMD telah dilaksanakan pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 pada dokumen RKPD dan dilakukan perubahan RPJMD di Tahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, dan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana mengoperasionalkan Perubahan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar Perubahan RPJMD (P-RPJMD) ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi merupakan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Perubahan RPJMD Tahun 2023 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen Perubahan RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Wali Kota terpilih dengan kondisi terkini. Pedoman transisi bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada Tahun 2024, menyusun dokumen capaian kinerja untuk wacana kepala daerah berikutnya. Kemudian selama sampai akhir periode P-RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir P-RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional Tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada RPJPD, diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024 serta APBD Tahun Anggaran 2024.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan P-RPJMD Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan P-RPJMD Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun Renstra yang berpedoman pada P-RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidempuan ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai Tahun 2019 hingga Tahun 2023.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan P-RPJMD Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidempuan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja OPD.
5. Evaluasi pelaksanaan P-RPJMD Kota Padangsidempuan dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Wali Kota terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kota Padangsidempuan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang P-RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan YME, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen Perubahan RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidempuan pada masa yang akan datang.

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 01 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : (5-103/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG
SIDEMPUAN TAHUN 2019-2023

Tabel 6.5

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program prioritas Pembangunan Daerah beserta Pagu Indikatif Tahun 2021-2023

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program prioritas Pembangunan Daerah														
PADANGSIDEMPUAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBLAKUKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
M.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral, dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan Taqwa (Imtaq) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas														
M.4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera														
M.6. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi masuknya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya														
Meningkatkan daya saling Sumber Daya Manusia				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,83		76,32		76,803		76,803		
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat				Indeks Pendidikan		77,19		77,61		78,04		78,04		
Peningkatan daya saling layanan pendidikan sebagai Kota Pelajar	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar	Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	91,98%	92,43%	64.167.943.332	93,62%	37.361.050.910	94,89%	37.361.050.910	94,89%	138.890.045.152	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	87,86%	91,41%		93,11%		95,02%		95,02%		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	79,72%	81,14%		82,36%		83,27%		83,27%		
				Angka Melek Huruf	99,95%	99,96%		99,97%		99,98%		99,98%		
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat				Indeks Kesehatan		76,4		76,83		77,27		77,27		
Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	10%	20%	216.950.860	30%	711.364.431	50%	673.654.575	50%	1.601.969.866	

PADANGSIMPUNAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		UPTD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabab/pandemi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,15%	100%	100%	51.318.204.068	100%	32.597.382.544	100%	31.916.453.426	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	86,71%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90,07%	100%		100%		100%		100%		
				Cakupan pelayanan balita sesuai standar	80,80%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,78%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase usia 15-59 th mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	69,76%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Warga negara usia 60 th ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	60,52%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,05%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,03%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

PADANGSIMPUNAN PEKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
MISI/ TUJUAN/ SAS AKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	70,44%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase org terduga penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	61,17%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV' sesuai standar	78,24%	100%		100%		100%		100%		
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,171	0,167		0,163		0,160		0,160		
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		97,95		98,17		98,38		98,38		
	Pemberdayaan perempuan dan kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas perempuan dan pemuda melalui pembinaan organisasi, kepramukaan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,23%	2%	588.422.755	5%	725.427.007	7%	732.790.261	7%	2.046.640.023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan										
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		40		41		42		42		
	Pemberdayaan perempuan dan kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas perempuan dan pemuda melalui pembinaan organisasi, kepramukaan,	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAUNG KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6,17%	7%	1.277.928.421	7%	1.029.573.109	7%	1.029.573.109	7%	3.337.074.639	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

PANDUAN SIMPULAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
ASPEK/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBERAKSIAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		pelatihan teknis ptdn dan keumahaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	NA	0%	0	70%	300.000.000	70%	300.000.000	70%	600.000.000	
		Peningkatan kualitas dan daya saing olahraga daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA SANG KEDOLAHRAKAAAN	Persentase Prestasi Olahraga	0	0,9%	1.789.164.680	1%	1.497.702.798	2%	1.497.702.798	2%	4.784.570.276	
M.2 Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan peran ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengolahan dan produksi Usaha Kecil Menengah, dan industri rumah tangga														
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat				Tingkat kemiskinan		7,27		7,13		7,00		7,00		
Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat				PDRB per kapita		29,19		29,59		30,00		30,00		
				Tingkat Pengangguran Terstruktur		6,63		5,82		5,00		5,00		
	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pengembangan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan lapangan usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi	13,5%	65%	1.041.471.938	54,2%	1.156.489.381	56,90%	1.156.489.381	56,9%	3.354.450.700	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM Peningkatan TENAGAKERJA	Persentase Tenaga kerja yang dapat patikan	37,7%	30%	209.976.050	35%	235.000.000	40%	235.000.000	40%	679.976.050	
Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat				Indeks Gini		0,33		0,315		0,300		0,300		
	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	86%	100%	677.639.380	100%	697.000.000	100%	697.000.000	100%	2.071.639.380	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMPAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang mendapat Perlindungan dari Jaminan Sosial	NA	40%	1.072.804.375	41%	1.013.869.470	45%	1.013.869.470	45%	3.100.543.315	
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang unggul berbasis ekonomi kerakyatan				Laju Pertumbuhan Ekonomi		1,18		3,09		5,00		5,00		
	Meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas unggulan daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran		1,25		26,1		4		4,00		

[illegible]

PADANGSIDIMPUAN BERKUALITAS, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		DPRD PEMANGGUNG JAWAB
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
M. 7 Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel														
Meningkatkan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah yang berkelanjutan				Indeks Layman Kualitas Infrastruktur		87,06		87,87		88,68		88,68		
	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat Kota Padangsidimpuan			Indeks Konektivitas Wilayah		75		77,5		80		80		
				Persentase kawasan kumuh		99,12		98,24		97,36		97,36		
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	69,81%	72%	24.983.728.716	78%	15.813.329.432	85%	15.813.329.432	85%	56.610.387.580	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan permukiman strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tertangani	81,87%	82,25%	1.172.228.955	82,28%	1.200.000.000	82,30%	1.200.000.000	82,30%	1.200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peran Masyarakat dalam penataan Ruang	NA	0,19%	1.055.839.910	0,58%	690.000.000	0,98%	690.000.000	0,98%	2.435.839.910	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana publik	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan penerangan jalan umum	55,61%	58,47%	20.459.931.713	61,32%	21.841.055.323	64,18%	21.841.055.323	64,18%	21.841.055.323,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan infrastruktur dasar yang ditangani (jalan/gang)	178.739 m	183.739 m		188.739 m		193.739 m		193.739 m		
Meningkatnya pengelolaan aktivitas pembangunan berkelanjutan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71,1		71,4		71,7		71,7		

PADANGSIMPUN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAI KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan daerah pinggiran sungai, pariwisata maupun kawasan strategis lainnya sebagai sarana publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	NA	90%	346.272.160	90%	380.000.000	90%	380.000.000	100%	1.106.272.160	Dinas Lingkungan Hidup
		Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu												
M.5. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean dan good governance</i>) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku														
				Indeks Reformasi Birokrasi		C		CC		B		B		
				Nilai Sakip		B		B		BB		BB		
	Implementasi Reformasi Birokrasi	Pengutan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan	62,33%	67%	678.595.379	72%	1.393.863.905	77%	1.217.099.556	77%	3.289.558.840	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%		100%		100%		100%	113.960.121.024	Sekretariat Daerah
				Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja	NA	B		B		BB		BB		
				Persentase fasilitas urusan kedinasan KDH dan Wakil KDH	100%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase informasi KDH/Wakil KDH yang ekapose ke media/media sosial	100%	100%		100%		100%		100%		

PADANGSIDEMPUAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA														
MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	AKAR KEBUTUHAN	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan			Opini BPK		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Implementasi Reformasi Birokrasi	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Persentase pengeluaran SP2D yang tepat waktu	90%	100%	123.206.019.347	100%	108.241.793.135	100%	108.241.793.135	100%	339.689.605.617	
				Persentase penyampaian laporan keuangan OPD yang tepat waktu	83,33%	100%		100%		100%		100%		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/, Kematanganan SPIP, Tindakan lanjut LHP, Nilai LAKIP	100%	100%	1.161.276.000	100%	1.120.130.000	100%	1.120.130.000	100%	3.401.536.000	Inspektorat
	Meningkatnya pelayanan publik yang handal dan prima			Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik		Baik		Baik		Baik		
	Implementasi Reformasi Birokrasi	Mengembangkan dan menerapkan e-government berbasis informasi dan teknologi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	NA	80%	1.435.134.091	85%	640.940.285	90%	640.940.285	95%	2.717.014.661	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,18%	30%	165.808.570,00	36%	36.731.500,00	40%	36.731.500,00	40%	239.271.570	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online	80	85	516.141.557	90	500.000.000	95	500.000.000	95	1.516.141.557	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

WALI KOTA PADANG SIDEMPUNAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempunan
pada tanggal 01 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUNAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (5-103/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN
2019-2023

Tabel 7.4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTA KELOMPOK PENDANAAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
PENDIDIKAN												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	166.273.957.749,00	100%	127.296.974.177,00	100%	127.296.974.177,00	100%	420.867.906.103,00	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	91,98%	92,43%	64.167.943.332,00	93,02%	37.361.050.910,00	94,89%	37.361.050.910,00	94,89%	138.890.045.152,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	87,86%	91,41%		93,11%		95,02%		95,02%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	79,72%	81,14%		82,36%		83,27%		83,27%		
		Angka Melek Huruf	99,95%	99,96%		99,97%		99,98%		99,98%		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100,06%	103,00%	365.263.082,00	102%	438.200.000,00	101%	438.200.000,00	101%	1.241.663.082,00	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	110,85%	110,62%		109,81%		108,94%		108,94%		
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV	86,88%	87,28%	-	88,72%	160.000.000,00	90,01%	160.000.000,00	90,01%	320.000.000,00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERGIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Terakreditasi	99,18%	99,18%	-	100%	169.983.000,00	100%	169.983.000,00	100%	339.966.000,00	
Kesehatan												
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani		100%	98.397.469.160	100%	86.426.288.820	100%	87.148.269.351	100%	271.972.027.331	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,15%	100%	51.318.204.068	100%	32.597.382.544	100%	31.916.453.426	100%	115.832.040.038	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	86,71%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90,07%	100%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	80,80%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,78%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase usia 15-59 th mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	69,76%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga negara usia 60 th ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	60,52%	100%		100%		100%		100%		

KODE	LIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,05%	100%	100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,03%	100%	100%		100%		100%			
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	70,74%	100%	100%		100%		100%			
		Persentase org terduga penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	61,17%	100%	100%		100%		100%			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	78,24%	100%	100%		100%		100%			
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,171	0,167	0,163		0,160		0,160			
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%		100%		100%			
8	PROGRAM PEMINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis Tenaga kesehatan promotif dan preventif	10%	20%	216.950.860	30%	711.364.431	50%	673.654.575	50%	1.601.969.866	
9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi dan IRTP yang sesuai standar	NA		197.326.360	100%	199.154.499	100%	202.521.741	100%	599.002.600	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang melaksanakan Germas	100%		1.107.379.270	100%	156.907.335	100%	150.198.536	100%	1.414.485.141	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	9.880.978.972	100%	9.801.059.955	100%	9.801.059.955	100%	29.483.098.882	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Irigasi Daerah dalam kondisi baik	78%	78%	14.159.300.499	79%	6.537.000.000	82%	6.537.000.000	82%	27.233.300.499	
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	cakupan rata-rata pelayanan air minum yang dilayani	26%	29%	1.410.850.000	31%	399.000.000	33%	399.000.000	33%	2.208.850.000	
14	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya pengelolaan TPA Sampah Regional	NA	82%	600.000.000		0		0		600.000.000	
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SS TEM AIR LIMBAH	Cakupan Mutu pelayanan sistem air limbah domestik	NA	80%	1.694.531.000		0		0		1.694.531.000	
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	54%	60%	1.490.773.426	61%	798.000.000	62%	798.000.000	62%	3.086.773.426	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Bangunan Gedung Pemerintah	NA	100%	10.985.654.320	100%	17.848.000.000	100%	17.848.000.000	100%	46.681.654.320	
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	69,81%	72%	24.983.728.716	78%	15.813.329.432	85%	15.813.329.432	85%	56.610.387.580	
19	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/janalis yang memiliki sertifikat kompetensi	NA	NA	0	16,66%	200.000.000	58,32%	200.000.000	58,32%	400.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OFT COMI)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		O/TD Penanggung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Permukiman dalam penataan Ruang	NA	0,19%	1.055.839.910	0,58%	690.000.000	0,98%	6.900.000.000	0,98%	2.435.839.910	
21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah jenis Infrastruktur SDA yang dikelola		1 Jenis	174.399.935					1Jenis	174.399.935	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemampuhan Jalan		100,00%	171.524.920					100,00%	171.524.920	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani		100%	4.931.343.088	100%	6.774.473.199	100%	6.774.473.199	100%	6.774.473.199	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Tertangani	0	0%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Unit RT/Rumah Tidak Layak Huni tertangani	81,87%	82,25%	1172.228.955	82,28%	1.200.000.000	82,30%	1.200.000.000	82,30%	1.200.000.000	
26	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan penertarikan jalan umum	55,61%	58,47%	20.459.931.713	61,32%	21.841.055.323	64,18%	21.841.055.323	64,18%	21.841.055.323,00	
		Cakupan infrastruktur dasar yang tertangani (jalan/pangki)	178.739 m	183.739 m		188.739 m		193.739 m		193.739 m		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	4.230.985.172,00	100%	4.988.569.952,00	100%	4.988.569.952,00	100%	14.208.125.076	Satpol PP
28	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trambus dalam Kab/Kota yang tertangani	100%	100%	4487.707.311,00	100%	3.721.638.143,00	100%	3.721.638.143,00	100%	11.930.983.597	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditetapkan	100%	100%		100%		100%		100%		
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	2.477.266.710	100%	2.299.338.660	100%	2.299.338.660	100%	7.075.944.030	
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat yang men perdri layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	2.286.803.760	100%	3.064.033.371	100%	3.064.033.371	100%	8.414.870.502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	3.979.438.221	100%	4.177.084.066	100%	4.177.084.066	100%	12333.606.353	Dinas Pemadam dan Kebakaran Penyelamatan
	PROGRAM PENGELOLAAN, PENYELAMATAN, KEMERAKAMAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi serta Layanan Penyelamatan dan evakuasi pada Kondisi Memerlukan Bantuan (Operasi Non Kebakaran) sesuai dengan response time	100%	100%	2.198.513.361	100%	2.354.387.498	100%	2.354.387.498	100%	6.907.288.357	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100	100%	4.405.968.366	100%	4.853.164.759	100%	4.853.164.759	100%	14.112.297.884	
33	PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang terdapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	NA	40%	1.072.804.375	41%	1.013.869.470	45%	1.013.869.470	45%	3.100.543.313	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD/Instansi yang bertanggung jawab	
				2021		2022		2023		TARGET	RP		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
34	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat Kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	NA	100%	653.802.460	100%	664.000.000	100%	664.000.000	100%	1.981.802.460	Dinas Sosial	
35	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti	20%	30%	457.124.052	32%	633.500.000	35%	633.500.000	35%	1.724.124.052		
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perontagan, Kelembagaan dan Sumber Daya Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	86%	100%	677.639.380	100%	697.000.000	100%	697.000.000	100%	2.071.639.380		
37	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	0%	100%	67.731.740	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	187.731.740		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													Dinas Ketenagakerjaan
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	4.822.187.572	100%	4.846.085.771	100%	4.846.085.771	100%	14.514.359.114		
39	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi	13,5%	65%	1.041.471.938	54,2%	1.156.489.381	56,90%	1.156.489.381	56,9%	3.354.450.700		
40	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	37,7%	30%	209.976.050	35%	235.000.000	40%	235.000.000	40%	679.976.050		
41	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PT/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	66,3%	70%	398.563.530	70%	734.623.938	70%	734.623.938	70%	1.867.811.406		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	2.911.158.486	100%	2.889.035.260	100%	2.850.249.792	100%	8.650.443.538		
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,23%	2%	588.422.755	5%	725.427.007	7%	732.790.261	7%	2.046.640.023		
44	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 10.000 Penduduk Perempuan)	1,47	1,4	674.941.370	1,2	762.863.929	1,1	764.149.976	1,1	2.201.955.275		
45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang telah mendapat Pembinaan	58,22%	60%	740.458.394	65%	553.519.431	70%	558.832.608	70%	1.852.810.433		
46	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	NA	50%	16.245.080	60%	16.864.248	70%	29.754.075	70%	62.863.403		
47	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	525	600	668.244.965	650	800.809.705	750	811.371.962	750	2.280.426.632		
48	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak	4,4	5,1	79.694.535	4	72.920.458	2,3	74.291.364	2,3	226.906.137		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani		100%	3.693.545.887	100%	4.110.096.965	100%	3.854.858.423	100%	11658.501.275		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab	
				2021		2022		2023		TARGET	RP		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah kelembagaan distribusi dan cadangan pangan nasional	53%	55%	34.260.000	56%	25.000.000	100%	400.000.000	100%	459.260.000	Dinas Pangan Ketahanan	
51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pembudayaan kelompok/masyarakat dalam meningkatkan diversifikasi pangan	50%	50%	974.649.915	80%	6.918.818.290	100%	637.057.062	100%	2.303.525.267		
52	PROGRAM PENANGANAN KEPRAWANAN PANGAN	Persentase masyarakat / kelompok penerima bantuan	33%	33%	117.300.130	67%	135.000.000	100%	29.999.770	100%	282.299.900		
53	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pembatasan keamanan pangan	40%	60%	158.713.860	80%	45.000.000	100%	85.000.000	100%	288.713.860		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
54	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	NA	2,44%	1.500.000.000,00	4,88%	3.000.000.000,00	7,32%	3.000.000.000,00	7,32%	3.000.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Jumlah husean Lahan Basu pakat akan yang menjadi Kepemilikan Pemerintah Kota Padangsidempuan (m2)	NA	50.000 m2	745.000.000,00	-	-	-	50.000 m2	-			
		Jumlah husean Lahan Air Bersih yang menjadi Kepemilikan Pemerintah Kota Padangsidempuan (m2)	NA	20.000 m2	375.000.000,00	-	-	-	20.000 m2	-			
		Jumlah husean Lahan untuk Kepentingan Umum yang menjadi Kepemilikan Pemerintah Kota Padangsidempuan (m2)	NA	1.000 m2	750.000.000,00	-	-	-	1.000 m2	-			
55	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Tanah Sengketa	NA	-	-	25%	150.000.000,00	35%	150.000.000,00	35%	150.000.000,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase bidang dalam menunjang urusan organisasi pemerintahan	90%	90%	10.608.912.837	90%	11.175.299.561	90%	11.175.299.561	90%	32.959.511.959	Dinas Lingkungan Hidup	
57	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	90%	0	90%	575.000.000	90%	575.000.000	100%	1.150.000.000		
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	NA	90%	346.272.160	90%	380.000.000	90%	380.000.000	100%	1.106.272.160		
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	100,01%	90%	1.320.003.098	90%	1.451.003.098	90%	1.451.003.098	30%	4.228.000.291		
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMBUNGAN	Persentase pengendalian sampah yang ditangani	77,5%	83%	6.903.413.987	82%	5.810.978.018	82%	5.810.978.018	85%	18.523.368.003		
61	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PERHADAPAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PHLH)	Persentase dokumen yang dikelola	NA	75%	139.096.070	75%	220.000.000	75%	220.000.000	60%	570.096.070		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBIAYAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		GMD Penanggung jawab	
				2021		2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
62	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kegiatan lingkungan yang memperoleh penghargaan dari pemerintah	NA	-	0	80%	50.000.000	80%	50.000.000	75%	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
63	PROGRAM PENANGKAPAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	NA	-	0	75%	35.000.000	75%	35.000.000	75%	70.000.000		
64	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup	NA	92%	169.860.000	90%	25.000.000	90%	25.000.000	90%	219.860.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	6.781.115.367,00	100%	6.112.115.632,00	100%	6.112.115.632,00	100%	19.005.346.631	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
66	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perkembangan KTP elektronik	87,39%	89%	347.352.630,00	90%	505.013.272,00	92%	505.013.272,00	96%	1.357.379.174		
67	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,18%	30%	165.808.570,00	36%	36.731.500,00	40%	36.731.500,00	40%	239.271.570		
68	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	NA	100%	113.900.570,00	100%	-	100%	-	100%	113.900.570		
69	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah profil Perkembangan Penduduk	NA	1 Dokumen	176.825.000,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	3 Dokumen	176.825.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	3.915.435.715	100%	4.219.287.537	100%	4.219.287.537	100%	12.351.010.789	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
71	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang membentuk kewenangan desa	NA	50%	0	50%	80.000.000	50%	80.000.000	50%	160.000.000		
72	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase BUMDES Aktif	24%	80%		90%		100%		100%			
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antardesa	42	42	137.481.175	42	87.000.000	42	87.000.000	42	311.481.175		
73	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaporan keuangan desa yang disampaikan tepat waktu	NA	100%	800.343.605	100%	947.855.812	100%	947.855.812	100%	2.696.055.229		
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa/ kelurahan yang lembaga kemasyarakatan/nya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	NA	80%	1.086.745.290	80%	981.681.367	80%	981.681.367	80%	3.050.108.024		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	99,35%	100%	4109169760	100%	4918067718	100%	4697895368	100%	13.725.132.846	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
76	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) menurun	22	22	323607210	21	338523000	20	305663000	20	967.793.210		
77	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,81%	15,52%	4657351003	15,50%	2282233850	14,98%	2494766200	14,98%	9.434.511.053	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Dinas Pembangun jabat	
				2021		2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
78	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMINGKATAN KEUANG SEJAHTERA (PS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi	97,75%	98,20%	1573816230	98,50%	546553390	98,75%	587053390	98,75%	2707.423.010		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	5.975.091.249	100%	5.763.372.211	100%	5.749.731.180	100%	17.488.197.640	Dinas Perhubungan	
80	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan angkutan darat	24,69%	27%	2.599.385.080	27%	2.695.305.146	27%	2.708.946.177	27%	8.003.636.403		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang urusan yang tertangani	NA	100%	1.632.983.368	100%	3.069.682.773	100%	3.069.682.773	100%	7.772.318.914	Dinas Komunikasi dan Informatika	
82	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	NA	80%	1.435.134.091	85%	640.940.285	90%	640.940.285	95%	2.717.014.661		
83	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	NA	80%	1.407.095.102	85%	1.266.989.000	90%	1.266.989.000	95%	3.941.073.102		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENEKANG													
84	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan pembinaan kesehatan KSP/USP	175	29,02%	412.059.299	29,02%	395.800.000	29,02%	395.800.000	29,02%	1.203.659.299	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEKANG, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan IKM Mikro	NA	2%	71.743.046	7,90%	223.066.303	7,90%	223.066.303	7,90%	517.875.652		
86	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Sektor IKM Mikro	NA	15%	1.334.899.730	15%	696.350.562	15%	700.000.000	15%	2.731.250.292		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	NA	100	5.627.216.113	100	5.783.050.079	100	5.783.050.079	100	17.193.316.271	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
88	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMIA/PMNA) Miliar Rupiah	13	20	370.438.555	25	250.000.000	30	250.000.000	30	870.438.555		
89	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi LOI dan penawaran potensi investasi	PM	1	631.290.695	2	590.000.000	3	590.000.000	3	1.811.290.695		
90	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online	80	85	516.141.557	90	500.000.000	95	500.000.000	95	1.516.141.557		
91	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase IKPM yang dilaporkan	NA	80	446.447.100	85	150.000.000	90	150.000.000	90	746.447.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
92	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengembangan Sistem Terintegrasi	PM	1	170.354.370	1	110.000.000	1	110.000.000	1	390.354.370		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETEMUDAAN DAN OLAH RAGA													
93	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KETEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6,17%	7%	1.277.928.421	7%	1.029.573.109	7%	1.029.573.109	7%	3.337.074.639	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata	
94	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANG KOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga	0	0,9%	1.789.164.680	1%	1.497.702.798	2%	1.497.702.798	2%	4.784.570.276		

KODE	BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
95	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Keperawatan	NA	0%	0	70%	300.000.000	70%	300.000.000	70%	600.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SBTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	NA	100%	100.000.000	100%	111.461.530	100%	111.461.530	100%	32.1923.060	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DINY												
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN IT SAKSIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Peningkatan kompetensi SDM Perseorangan	NA	2 Orang	100.000.000	2 Orang	55.000.000	2 Orang	55.000.000	2 Orang	210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
98	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Festival Seni dan Budaya	4 kali	4 kali	200.000.000,00	5 kali	698.698.000,00	5 kali	698.698.000,00	5 kali	1.597.396.000	Dinas Pendidikan
99	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Organisasi Kebudayaan yang Terbina	40%	50%	-	60%	149.500.000,00	70%	149.500.000,00	70%	299.000.000	
100	PROGRAM ILLUSTRASI DAN PENGELAAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Bangunan Cagu Budaya yang Diderikan	66,67%	77,77%	299.999.615,00	88,88%	-	100%	-	100%	299.999.615	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	92,67%	100%	4.300.811.576	100%	4.952.884.447	100%	4.754.170.735	100%	14.007.866.758	Dinas Perpustakaan
102	PROGRAM PERPUSTAKAAN	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,9%	3,2%	345.373.000	3,5%	102.103.339	4,3%	229.426.353	4,3%	676.902.692	
103	PROGRAM ILLUSTRASI DAN PENGELAAAN NASIONAL DAN NASIONAL KNO	Jumlah koleksi budaya etnis masyarakat yang terasap dan/atau terasap yang ada di wilayahnya	64	0	-	304	15000.000	354	5.0000000	354	65.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
104	PROGRAM PENGELUASA AKSP	Tingkat ketermudahan akses atau bahan akuntabilitas karya, alat buku yang sah dan pertanggungjawaban nasional	NA	0%	0	75%	128.451.560	75%	164842258	75%	293.293.818	Dinas Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
105	PROGRAM PENGELUASA PERIKANAN, BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	40%	55%	389.960.963	58%	515.000.000	63%	515.000.000	63%	1.419.960.963	Dinas Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	4.305.033.839	100%	4.106.393.171	100%	4.106.393.171	100%	12.517.820.181	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
107	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kata-rata Lama Tenggul	11 hari	11 hari	1.702.818.891	1 hari	936.250.618	1 hari	936.250.618	2 hari	3.575.320.127	
108	PROGRAM PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pelayanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kota	145,58%	10%	2.436.309.201.20%	47,34349	25%	473.39849	25%	1.189.910.618		
109	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang di Serifikasi	12,90%	13%	305.186.165	13%	538.263.876	14%	528.263.876	14%	1.361.713.917	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	99,45%	100%	8.496.650.491	100%	9.279.667.346	100%	9.279.667.346	100%	27.055.983.183	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBAKURAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (KUP/COMI)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OFD/Pemangung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
111	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (kg/ha)	3,82%	6,48%	1.19.990.658	6,64%	735.000.000	6,89%	735.000.000	6,89%	1.629.990.658	Dinas Pertanian
		Persentase populasi ternak yang ditingkatkan	-12,60%	45%		48%		50%		50%		
112	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan yang mampu difasilitasi ketersediaan prasarana pertaniannya (ha)	58 ha	64,8 ha	4.975.212.338	66,1 ha	1.787.265.017	69,3 ha	1.787.265.017	69,3 ha	8.549.742.372	
113	PROGRAM PENGELOMIALAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Ternak yang Didasi	80%	88%	320.76963	90%	100.000.000	92%	100.000.000	92%	232.076.963	
114	PROGRAM PENGELOMIALAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPH (Persen)	2,50%	-	-	2%	60.000.000	1,8%	60.000.000	1,8%	120.000.000	
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	59	53	496.005.160	64	329.000.000	65	329.000.000	65	1.154.005.160	
		Jumlah kelompok tani yang dibentuk	168	195		202		208		208		
		Jumlah Produk Pertanian Daerah yang Dikenal	7	11		13		14		14		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	99,35%	100%	5.445.361.588	100%	5.284.756.635	100%	4.785.609.760	100%	15.515.727.983	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
117	PROGRAM PEMBERKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pinjaman sesuai dengan ketentuan (KUPP/SIUP Pusat dan Perbelanjaan) dan KUTM/UTS/SIUP Toko Serabuan	18,64%	20%	1.016.309.423	25%	2.879.024.973	25%	2.879.024.973	25%	6.774.359.369	
118	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAH POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Barang Produk	1,71%	2,2%	19.692.470	3,2%	54.750.000	3,2%	54.750.000	3,2%	129.197.470	
119	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah temuan produk tidak layak konsumsi	NA	0	-	50	95.128.200	50	95.128.200	50	190.256.400	
120	PROGRAM PENGUNCIAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kenaikan Omset UKM/UMKM yang mengikuti Pameran	NA	20%	753.904.450	30%	760.000.000	30%	800.000.000	30%	2.313.904.450	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
121	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMERANGKUAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Daerah	22%	24%	117.265.897	26%	249.789.901	28%	254.813.458	28%	621.869.256	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
122	PROGRAM PENGELOMIALAN ZON USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UII) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	995.26.120	100%	99.526.120	100%	100.000.000	100%	2.99.052.210	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH												
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	41.801.188.929	100%	32.196.754.993	100%	39.962.177.092	100%	113.960.121.021	Sekretariat Daerah
124	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Ralat SAKIP pada komponen pelaporan kinerja	NA	0		0		0				
		Persentase Indeks uraian ketidaksihan KDI dan Wakil KDI	100%	100%		100%		100%		100%		

KODE	DIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RIUMUD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIGDE RIUMUD		OPD Pemanggang jawat
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
		Persentase informasi KDH/wakil KDH yang ekspose ke medi a/media sosial	100%	100%		100%		100%		100%		
125	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESELAJITERAAN RAKYAT	Persentase Maning-masing Urusan yang capainya > 50%	100%	100%	6.905.903.813	100%	9.061.116.058	100%	7.829.308.152	100%	23.796.328.023	
		Persentase Perda yang diregulasi	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%		
126	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase harga bahan pokok yang di luar kewajaran	0%	0%		0%		0%		0%		Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang melaporkan realisasi fisik dan anggaran tepat waktu	100%	100%	3.996.141.812	100%	2.085.000.000	100%	5.440.302.251	100%	11.521.444.063	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	100%		100%		100%		100%		
SEKRETARIAT DPRD												
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN YANG TERTANGANI	100%	100%	28.865.642.373	100%	25.889.041.394	100%	24.429.412.613	100%	79.184.096.380	Sekretariat DPRD
128	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PERDA YANG DITETAPKAN TEPAI WAKTU	100%	100%	8.637.157.155	100%	3.538.675.260	100%	10.357.053.866	100%	225.52.986.281	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN												
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	100%	6.363.549.014	100%	6.584.003.966	100%	6.504.003.966	100%	19.451.556.946	
130	PR OG RAJ A KOO RD URA S I QUA RTAS SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	62,33%	67%	678.595.379	72%	1.393.863.905	77%	1.217.099.556	77%	3.289.558.810	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
131	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	100%	100%	1.347.186.326	100%	1.185.621.585	100%	1.198.172.715	100%	3.730.980.626	
KEUANGAN												
132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	85%	100%	20.694.447.174	100%	11.938.488.957	100%	11.938.488.957	100%	44.571.425.088	
133	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Persentase pengeluaian SP2D yang tepat waktu	90%	100%	123.206.0193.17	100%	108.241.793.135	100%	108.241.793.135	100%	339.689.605.617	
		Persentase penyusunan laporan keuangan OPD yang tepat waktu	83,33%	100%		100%		100%		100%		
134	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Bermasalah yang diselesaikan	4,90%	15%	1.282.037.815	35%	1.752.616.581	50%	1.752.616.581	50%	4.787.300.977	
135	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kepatuhan pajak dan retribusi daerah	0,64%	51%	1.520.186.294	54%	1.315.000.000	57%	1.315.000.000	57%	4.150.186.294	
KEPEGAWAIAN												
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	87,28%	90%	4.967.748.795	90%	5.603.629.168	90%	5.603.629.168	90%	16.175.007.131	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
137	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,29%	30,21%	2.324.291.823	34,62%	1.935.313.811	35,96%	1.935.313.811	35,96%	6.194.919.445	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
138	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	217%	217%	1.130.000.000	218,78%	400.000.000	219,58%	400.000.000	219,58%	1.130.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Persentase pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan	22,31%	23,26%		24,11%	25,06%	25,06%				
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
139	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	na	75%	987.146.557	75%	1.100.000.000	80%	1.344.213.219	80%	3.431.359.776	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
INSPEKTORAT DAERAH												
140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dilaksanakan	100%	100%	8.499.854.191	100%	8.659.626.081	100%	8.659.626.081	100%	25.819.106.353	Inspektorat
141	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/khusus/, Kemungkinan SFT, Tindakan/LHP, Ndi LAKIP	100%	100%	1.161.276.000	100%	1.120.130.000	100%	1.120.130.000	100%	3.401.536.000	
142	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, DAN ASISTENSI	Persentase Pelaporan LIKPN tepat waktu Persentase Pelaporan LIKASN tepat waktu	100% -	100% 70%	325.625.890	100% 75%	207.000.000	100% 80%	207.000.000	100% 80%	739.625.890	
UNSUR KE WILAYAHAN												
KECAMATAN												
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	NA	100%	12.202.282.356	100%	12.481.018.765	100%	12.481.018.765	100%	12.449.236.102	Kecamatan Padangsidempuan Utara
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat partisipasi masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam pemerintah di kecamatan	NA	95%	125.162.990	90%	567.498.085	90%	567.498.085	90%	92.281.538	
145	PROGRAM PELIBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan Pemberdayaan ekonomi di Kecamatan	NA	95%	459.727.285	95%	355.200.000	95%	355.200.000	95%	461.727.285	Kecamatan Padangsidempuan Utara
146	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan di Kecamatan	NA	95%	129.820.900	95%	253.125.225	95%	253.125.225	95%	153.597.150	
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	NA	100%	8.611.889.809	100%	9.464.974.027	100%	9.464.974.027	100%	27.564.837.863	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMALAMAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab
				2021		2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
148	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam pemerintahan di Kecamatan	NA	100%	643.069.750	100%	643.986.600	100%	643.986.600	100%	1.931.042950	Kecamatan Padangsidu puan Selatan
149	PROGRAM PEMBENDAYAKAN DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan	NA	100%	323.251.075	100%	288.730.000	100%	288.730.000	100%	900.711073	
150	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	NA	100%	38.405.110	100%	182.691.082	100%	182.691.082	100%	403.787.274	
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertampung	NA	100%	4.054.019.183	100%	4.658.858.066	100%	4.613.858.066	100%	13.327.665.315	Kecamatan Padangsidu puan Tenggara
152	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam pemerintahan di Kecamatan	NA	90%	100.337.731	95%	171.800.000	100%	111.800.000	100%	383.937.731	
153	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	NA	85%	52.928.100	90%	175.000.000	95%	220.000.000	95%	447.928.100	
154	PROGRAM PEMBENDAYAKAN DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi di Kecamatan	NA	85%	155.360.490	90%	55.000.000	95%	55.000.000	95%	265.360.490	
155	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Temuan Inspektoral terhadap pelaksanaan keuangan desa yang di fund alkan	NA	0%	-	25%	60.000.000	35%	120.000.000	35%	180.000.000	Kecamatan Padangsidu puan Batunadua
156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertampung	NA	100%	3.272.335.619	100%	3.499.779.761	100%	3.499.779.761	100%	10.271.895.141	
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam pemerintahan di Kecamatan	NA	95%	247.347.065	95%	285.290.000	95%	285.290.000	95%	817.927.065	Kecamatan Padangsidu puan Batunadua
158	PROGRAM PEMBENDAYAKAN DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan	NA	95%	39.979.220	95%	150.000.000	95%	150.000.000	95%	339.9792.20	
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat/komunitas dalam kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	NA	90%	197.073.688	90%	135.000.000	95%	135.000.000	90%	4.77073.688	
160	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Temuan Inspektoral terhadap pelaksanaan keuangan desa	NA	-	-	85%	120.000.000	85%	120.000.000	85%	240.000.000	

KODE	NOMOR URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBAKSIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OFFICER Penanggung jawab
				2021		2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	NA	100%	4.968.179.934	100%	5.161.390.026	100%	5.161.390.026	100%	15.290.959.986	Kecamatan Padangsidimpuan Hutauru baru
162	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam Pemerintahan di Kecamatan	NA	100%	-	100%	287.000.000	100%	287.000.000	100%	574.000.000	
163	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan	NA	100%	245.515.525	100%	127.000.000	100%	127.000.000	100%	499.515.525	
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	NA	100%	-	100%	204.948.500	100%	204.948.500	100%	409.897.000	
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan Penunjang urusan yang dapat tertangani	NA	100%	2.794.179.646	100%	3.120.773.182	100%	3.120.773.182	100%	9.035.726.010	Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
166	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam Pemerintahan di Kecamatan	NA	100%	10.520.565	100%	18.380.666	100%	18.380.666	100%	47.282.897	
167	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan	NA	100%	159.069.805	100%	177.310.438	100%	177.310.438	100%	523.660.681	
168	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	NA	100%	55.943.610	100%	180.324.596	100%	180.324.596	100%	491.033.432	
169	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa	NA	-	0	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	60.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang urusan yang tertangani	NA	100%	3644677.059	100%	4.188.309.342	100%	4.188.309.342	100%	120.211.795.743	Kecamatan Bangsan dan Politik
171	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEHANGSAHAN	Rasio organisasi kemasyarakatan yang memperoleh Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan	NA	70%	302.115.935	80%	582.498.321	100%	582.498.321	100%	1.467.112.577	
172	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang Terbentuk Administrasi	NA	80%	1.111.429.472	90%	1.165.315.733	100%	1.165.315.733	100%	3.442.120.938	
173	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang berperan aktif	NA	60%	293235.0.000	75%	1.131.900.000	90%	1.131.900.000	90%	5.202.150.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD Penanggung jawab
				2021		2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
174	PROGRAM PEMBIYARAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	NA	100%	602.262.990	100%	631.500.000	100%	631.500.000	100%	1.865.262.990	
175	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase masyarakat yang terpapar ideologi anti pancasila	NA	85%	690.671.330	95%	512.083.421	100%	512.083.421	100%	1.714.838.172	
TOTAL					703.944.868.855		627.022.807.173		641.820.473.442		1.885.813.462.232	

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 01 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (5-103/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006